

**ANALISIS PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA TAHUN 2018 ANTARA
APIP DAN APH (STUDI KASUS KEPALA DESA MATAK KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS)**

**Oleh
ENDRIANSAH SUSENO
NIM. 180574201039**

ABSTRAK

Kepala Desa Matak Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Anambas pasca pengembalian indikasi Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak Hasil Audit Investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang dapat dikualifisir dalam Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH Tahun 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif karena Indikasi Kerugian Keuangan Negara dalam ruang lingkup Pemerintahan Daerah telah diatur sedemikian rupa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut. Hasil Penelitian ini adalah Pejabat APH dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Anambas mengeyampingkan Perjanjian Kerjasama Tahun 2018 tersebut dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Matak dengan alasan bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan audit tertentu atau audit yang dilakukan atas permintaan dari Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Anambas, sementara Perjanjian Kerjasama APIP dan APH Tahun 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hanya berlaku untuk audit reguler atau audit yang dilakukan secara rutin oleh APIP tanpa permintaan dari APH.

Kata Kunci : Penetapan Tersangka, Audit, Kerugian Keuangan Negara, Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH

**ANALYSIS OF DETERMINATION OF CORRUPTION SUSPECTS BASED
ON THE 2018 COOPERATION AGREEMENT BETWEEN APIP AND APH
(CASE STUDY HEAD OF MATAK VILLAGE, DISTRICT OF ANAMBAS
ISLANDS)**

By
ENDRIANSAH SUSENO
NIM. 180574201039

ABSTRACT

The Head of Matak Village, Anambas Islands Regency, was named a suspect by the Anambas Islands Resort Police after returning indications of State Financial Losses which were carried out less than 60 (sixty) days after the results of the Investigation Audit by the Anambas Islands District Inspectorate in 2021. The purpose of this study was to find out -things that can be qualified in the 2018 Cooperation Agreement between APIP and APH concerning Coordination of the Government's Internal Supervisory Apparatus with Law Enforcement Officials in Handling Public Reports or Complaints That Indicate Corruption Crimes in the Administration of Regional Governments. The research method used in this study is Normative Juridical because the Indication of State Financial Losses within the scope of Regional Government has been regulated in such a way in the Cooperation Agreement. The results of this study are APH Officers, in this case the Head of the Anambas Islands District Police, set aside the 2018 Cooperation Agreement in handling the Corruption Crime Case of the Matak Village Head on the grounds that the audit conducted by the Anambas Islands District Inspectorate was a specific audit or an audit conducted at the request of from the Anambas Islands District Police, while the 2018 APIP and APH Cooperation Agreement concerning Coordination of the Government's Internal Supervisory Apparatuses with Law Enforcement Officials in Handling Public Reports or Complaints That Indicate Corruption Crimes in the Administration of Regional Governments only applies to regular audits or audits carried out regularly routinely by APIP without request from APH.

Keywords: *Determination of suspects, Audit, State Financial Losses, Cooperation Agreement between APIP and APH*